

PENDIDIKAN ETIKA: PROFESI, POLITIK DAN AGAMA

Oleh Mikhael Dua

Abstract:

Good life is the final purpose of all men. Since Aristotle, ethics is supposed to achieve this purpose. It is a reflection of how to get good life. According to this philosophical assumption, being wealthy and brilliant never guarantee the quality of human person. This article talks about a good life in its relation with man as individual, and social being.

Kata Kunci:

Etika, Kehidupan yang baik, persoalan sosial dewasa ini

1. Persoalan yang Kita Hadapi

Pergumulan para dosen etika di mana-mana sama: bagaimana harus mengajarkan etika di tengah mata kuliah lain di universitas? Persoalan ini tidak hanya dilatarbelakangi rumitnya masalah etika. Tidak juga hal itu disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat terhadap masalah etika. Sebaliknya, masalah etika begitu jelas dan dekat dengan kita. Sebut saja beberapa contoh di antaranya seperti, masalah korupsi, masalah rapuhnya kehidupan rumah tangga karena konflik yang tidak dapat diselesaikan, masalah upah buruh yang mencerminkan ketidakadilan sosial, dan masalah penyalahgunaan kekuasaan. Semuanya itu dapat dibicarakan dari hari ke hari. Tugas etika sedemikian besar, karena masalah ini jarang direfleksikan secara mendasar.

Lalu, di mana letak persoalan kita sebagai etikawan dalam pendidikan etika? Juergen Habermas barangkali benar ketika ia menjelaskan bahwa sekarang kita harus berlari dengan waktu. Ilmu pengetahuan

dan teknologi telah mengubah cara pandang kita secara sistematis. Perubahan itu begitu cepatnya sehingga etika seolah-olah menjadi sebuah ilmu tanpa gigi dalam memecahkan masalah yang ia rumuskan dan kembangkan. Dalam latar belakang keterlambatan dan mungkin juga kelambanan etika tersebut, ilmuwan-ilmuwan mendorong dirinya sendiri untuk tampil sebagai guru moral yang berbicara tentang kebaikan masa kini dan masa depan manusia dan alam. Skenario pendidikan moral kaum sofis, sebagaimana dilaporkan oleh Plato pada abad keempat sebelum Masehi terulang kembali. Dengan bekal retorika dan keterampilan ilmiah yang berkembang pada waktu itu, kaum sofis, yang menjadi rival Sokrates, menjanjikan kepada orang-orang muda pengetahuan tentang moralitas manusia. Sebagai guru moral, para ilmuwan menjanjikan sebuah masa depan dunia dan kemanusiaan.

Namun di tengah hadirnya para guru moral, yang memiliki basis ilmu

pengetahuan dan profesi yang memadai, kritik Sokrates menjadi tak terhindarkan. Bagaimana mungkin kita dapat mengajarkan kebaikan dan keadilan sementara kita sendiri terjebak dalam partikularitas keahlian? Para ilmuwan pun sadar bahwa mereka tidak dapat memecahkan masalah etis. Bagi mereka,

filsafat itu sudah lama disadari Karl Popper ketika ia berbicara tentang ilmu pengetahuan.¹ Ilmu pengetahuan menggunakan metode empiris dan filsafat menggunakan metode yang meta-empiris, yang mencoba menyentuh persoalan mengenai *the conditions of possibilities*. Karl Marx yang sudah berhasil membumikan filsafat juga menyadari bahwa ilmu ekonomi yang berbicara tentang proses produksi dan distribusi bergerak dalam suatu kerangka logika tertentu. Dengan demikian, ekonomi tidak hanya sebuah masalah teknis, yang dapat dipahami dengan metode-metode ekonometri, melainkan juga menjadi masalah praktis yang memiliki logika tertentu.² Begitu juga ilmuwan-ilmuwan seperti Weizaeker melihat ada persoalan batas (*Grenzfrage*) yang tidak dapat diukur dan dijelaskan dengan metode ilmiah, namun perlu dijelaskan dengan bahasa dan metode yang berbeda. Kesadaran baru mengenai garis demarkasi ilmu dan filsafat ini sebenarnya dapat dilihat sebagai kemungkinan yang seluas-luasnya dari para filsuf dan etikawan untuk menemukan jawaban atas kerumitan masalah sosial yang dihadapi manusia dewasa ini. Namun, bagaimana para filsuf dan etikawan berjalan mengejar ketertinggalannya dalam memecahkan masalah-masalah baru sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi?

konsep keadilan, kebaikan, dan prinsip-prinsip etika lainnya tetaplah bersifat transendental dan tak terukur. Masalah etis, seperti halnya masalah filsafat pada umumnya, adalah masalah yang tidak dapat disentuh dengan metode ilmu pengetahuan. Garis demarkasi antara ilmu dan

Sepintas pertanyaan ini akan dijawab dengan mudah. Sebagai sebuah refleksi, etika telah lama memposisikan diri sebagai ajaran tentang hidup yang baik. Didukung oleh pandangan metafisik dan teologi tentang sebuah dunia yang teratur, tentang kodrat manusia yang rasional, tentang dunia profan dan tentang dunia surgawi, etika dapat memberikan harapan bahwa manusia dapat menentukan sendiri dengan benar bagaimana seharusnya hidup ini dibangun dan dikembangkan. Sejak Sokrates di dunia Barat dan Lao Tse dan Konfusius di dunia Timur, etika dibangun di atas keyakinan bahwa kita dapat berbicara tentang hidup yang baik dan masyarakat yang adil. Konsep filosofis Konfusianisme tentang masyarakat keluarga yang harmonis, Plato tentang *polis* (negara kota), gagasan Thomas Aquinas tentang *societas civilis*, dan begitu juga pandangan John Rawls tentang *a just society* menegaskan bahwa setiap orang dapat mengorganisasikan waktunya agar hidup dengan baik sesuai dengan konsepnya tentang hidup yang baik.³

Tetapi perkembangan dan perubahan sosial berjalan begitu cepat, sehingga tatanan sosial dan metafisik tidak lagi memberikan orientasi etis yang berarti tentang bagaimana seharusnya hidup sebagai manusia. Teori-teori politik tidak mampu menjawab pertanyaan mengapa warga negara dalam sebuah

masyarakat demokratis harus mengorientasikan diri mereka pada kebaikan bersama, ketika teori-teori tersebut tidak setuju satu sama lain tentang prinsip hidup bersama. Proses sosialisasi tentang moralitas masyarakat kerap kali tidak memiliki kaitan dengan gagasan keadilan dan bentuk-bentuk politik yang sudah diterima sebelumnya. Pesimisme filosofis ini membuat seorang seperti Theodore Adorno menyebut etika sebagai ilmu yang melankolis, ilmu yang lesu, yang tidak bersemangat dan bahkan tidak memiliki daya tarik sama sekali kecuali merefleksikan situasi kehidupan yang rusak.⁴

Dalam situasi pesimisme terhadap etika seperti ini persoalan yang harus dijawab adalah: apakah etika masih memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan mengenai hidup yang baik, ketika ordo metafisik melenyap sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Jika dewasa ini ilmu pengetahuan memberikan janji bagi kehidupan manusia yang lebih baik, dapatkah etika membantu menjelaskan apa artinya hidup yang lebih baik?

2. Etika Profesi, sebuah Bom Waktu

Pertanyaan terakhir ini penting untuk dicermati. Jika masa lampau etika mengandaikan sebuah pemikiran metafisika mengenai sebuah ordo realitas ideal yang menakjubkan untuk dikejar dan direfleksikan terus menerus, dewasa ini perkembangan etika memiliki pautan dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan dunia kerja.

Perkembangan ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1960-an. Beberapa gejala menunjukkan bahwa

etika bangkit bersamaan dengan kerinduan masyarakat modern untuk mencari kehidupan yang baik dalam dunia kerja dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam latar belakang dunia kerja inilah etika dewasa ini menampilkan diri dengan wajah yang berbeda, yang khas. Wajah khas yang dimaksud adalah wajah etika profesi, suatu etika yang merefleksikan kehidupan profesional masing-masing anggota masyarakat dalam memberikan layanannya berdasarkan *collective services ideals* yang dimiliki oleh kelompok profesional.⁵

Di antara profesi-profesi yang berkembang dewasa ini, yang pertama yang dapat kita perhatikan adalah perkembangan di bidang etika medis.⁶ Sejak tahun 1960-an, banyak dokter sudah berhadapan dengan pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Perkembangan yang menakjubkan di bidang teknologi medis untuk memperpanjang kehidupan tidak dengan sendirinya diterima. Banyak persoalan etis segera muncul. Yang pertama adalah persoalan mengenai kelayakan hidup sebagai manusia setelah intervensi teknologi medis. Ceritera mengenai hidup yang diperpanjang banyak ditemukan pada mereka yang mendapat perawatan kanker, cuci darah, stroke yang fatal. Apakah etis kita mempertahankan kehidupan yang menderita hanya karena hidup yang diperpanjang itu adalah hidup dari orang-orang terdekat kita?

Begitu juga jika kita berbicara tentang masalah distribusi layanan kesehatan. Membeli alat dialisis darah untuk mempertahankan kehidupan beberapa pasien kaya, sementara itu membiarkan terbengkalai klinik-klinik

rawat jalan yang berguna bagi banyak orang merupakan pertanyaan serius yang dihadapi banyak pemerintahan di seluruh dunia dan rumah sakit-rumah sakit. Ini adalah masalah keadilan dalam layanan kesehatan. Masalah etika medis ketiga berkaitan dengan perubahan praktek layanan medis. Hubungan personal yang menandai praktek dokter sebelumnya sekarang mengalami perubahan karena dokter-dokter sendiri harus bergantung pada rumah sakit dan laboratorium klinis. Keahlian dan kerja sama antara dokter menjadi beban tersendiri yang harus dipikul pasien.

Masalah-masalah ini tidak dapat dipecahkan oleh para dokter. Ia membutuhkan para etikawan yang memiliki minat besar di bidang ini. Beberapa universitas mensponsori pertemuan antara etikawan dan para dokter. Yang terkenal adalah Institute of Society, Ethics and the Life Sciences in Hastings-on-Hudson (New York) yang didirikan pada tahun 1969. Pusat ini banyak menyelenggarakan kursus etika medis yang mendapat respons besar di seluruh dunia. Pusat semacam ini bekerja dengan sistem interdisipliner di mana para dokter, filsuf, teolog, ahli hukum dan ilmu-ilmu sosial dapat bekerjasama untuk memecahkan masalah etis kedokteran. Dalam pusat seperti ini para filsuf memainkan peranan yang sentral sebagai moderator diskusi tentang masalah-masalah etika di bidang medis. Dari Hastings Center inilah banyak pusat etika di seluruh dunia belajar. Di Indonesia, kita mengenal Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya. Sejak tahun 1986 hingga tahun-tahun terakhir ini, pusat ini mensponsori diskusi-diskusi etika biomedis

bersama staf dari Fakultas Kedokteran di Indonesia.⁷

Yang kedua adalah etika hukum. Jenis etika ini praktis diajarkan di fakultas-fakultas hukum. Namun sejarah etika hukum memiliki tuntutan yang berbeda dengan sejarah munculnya etika medis. Etika medis berkembang karena para filsuf dapat memberikan jawaban yang tidak diketahui para dokter. Sebaliknya, hukum memiliki tradisi yang bersentuhan dengan gagasan filsafat. Konsep-konsep seperti keadilan, kesamaan derajat di hadapan hukum, hak dan kewajiban adalah konsep-konsep yang sama-sama digeluti filsafat dan hukum. Lalu, di mana sumbangan etikawan dalam etika hukum. Dewasa ini pengembangan etika di bidang hukum menjadi lebih urgen justru ketika hukum kita menjadi positivistik. Dalam cara pandang ini, pertimbangan etis justru dapat diabaikan sama sekali. Dalam diskusi hukum, kerap kali dibedakan antara masalah hukum dan masalah moral. Masalah hukum memiliki dampak yang dapat diperhitungkan berdasarkan sanksi hukum, sedangkan masalah moral hanya bersentuhan dengan hati nurani, yang sanksi-sanksinya masih sebatas sanksi moral dan sosial. Hukum dalam pengertian ini memiliki batasnya. Dalam hal ini, etikawan dapat memberikan sumbangan yang besar dalam bidang pengembangan etika hukum, justru ketika ia membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang problem-problem etika yang tidak dapat dijawab dengan pendekatan hukum, misalnya masalah mengenai keadilan dalam prosedur hukum itu sendiri. Apakah hukum selalu adil, merupakan pertanyaan tersendiri dari Sokrates dan para filsuf modern dewasa ini.

Yang ketiga adalah etika rekayasa. Seperti halnya etika medis dan etika hukum, etika ini merupakan sebuah bom etika yang baru muncul kurang lebih pada 4 dekade yang lalu. Awalnya berangkat dari kepedulian etis kelompok rekayasawan berhubungan dengan persoalan sekitar penggunaan teknik.⁸ Persoalan-persoalan yang dimaksud adalah keselamatan kerja, kejujuran profesi, hak dan kewajiban profesional dan masalah lingkungan. Kepedulian terhadap masalah-masalah tersebut diperjelas dengan munculnya pelbagai macam kasus yang melibatkan profesi rekayasawan dan kebijakan manajemen. Sekedar untuk disebutkan beberapa kasus berikut semakin mempertanyakan orientasi profesionalitas dan kepentingan umum, seperti: ledakan Challenger, 28 Januari 1986, ledakan pusat tenaga nuklir Chernobyl, dekat Kiev (Ukraina) pada tahun yang sama, kasus rekayasa pembuatan mobil Ford Pinto yang mudah meledak (yang menjadi alasan para insinyur dan manajer Ford dipenjara akhir tahun 70-an).

Dalam semangat kepedulian etis seperti ini, para ahli rekayasa mencoba menawarkan kode etik rekayasawan sebagai respons terhadap persoalan etis baru tersebut. Namun, gagasan dasar di balik kode etik membutuhkan bantuan para etikawan yang mencoba mendalami bidang ini secara lebih serius. Dalam semangat dasar inilah kita dapat mengerti jika ahli etika seperti Harding dan Canfield (1936), Mantel (1964), dan Hans Jonas (1979) mulai menerbitkan beberapa buku pegangan di bidang etika rekayasa. Pembedaan antara masalah teknis dan masalah etis ditekankan di sini. Jika teknik berbicara tentang apa yang dapat

dilakukan, maka etika membawa para rekayasawan untuk menggeluti persoalan apa yang boleh saya lakukan.

Persoalan-persoalan etika di bidang medis, hukum, dan rekayasa memiliki hubungan dengan persoalan yang lebih besar dari itu. Persoalan yang dimaksud adalah masalah etika bisnis. Inilah bom etika yang keempat. Bidang ini mendapat perhatian luas, karena langsung berkaitan dengan mamon, kekayaan. Diskusi mengenai perkembangan ekonomi dan bisnis memiliki tradisi yang jauh lebih tua dari ketiga jenis etika sebelumnya, jika kita mengamati tegangan yang terjadi antara kapitalisme dan sosialisme dalam sejarah perkembangan ekonomi. Dalam tegangan antara aliran-aliran tersebut, kita sebenarnya sudah melihat inti masalah etis di sana, seperti: keadilan sosial, demokrasi, tanggung jawab sosial perusahaan dan sebagainya. Pertentangan bisnis tersebut tidak hanya menjadi perhatian dalam etika bisnis, tetapi juga menjadi persoalan utama dalam profesi-profesi lain seperti akuntansi, perawat, dan jurnalis.

Dengan demikian, fenomena bom etika profesi ini tidak dapat dihindarkan. Tanpa disadari etika dewasa ini bukanlah urusan para filsuf dan teolog saja. Fenomena ini menunjukkan bahwa para profesional ingin beretika. Jika tidak ingin dibantu oleh para etikawan, mereka ingin berjalan sendiri. Munculnya kode etik di mana-mana baik untuk dunia profesi maupun untuk lembaga atau perusahaan menunjukkan bahwa etika profesi adalah urusan profesi itu sendiri. Sementara itu para etikawan juga harus mengorientasikan diri secara baru. Kuliah-kuliah etika tidak cukup membatasi diri pada persoalan teori-teori etika umum,

seperti etika utilitarian Bentham, deontologi Kant, etika komunikasi Habermas, dan etika keutamaan Aristoteles. Dewasa ini kuliah-kuliah etika umum perlu dipertajam lagi dengan persoalan-persoalan etika profesional, jika kita ingin agar etika dapat berbicara dalam wilayah profesi yang kita hadapi. Para etikawan diminta untuk memiliki kemampuan aplikatif terhadap persoalan-persoalan etika profesi.

3. Dimensi Sosial Politik Moralitas Manusia

Fokus utama etika profesi adalah persoalan hubungan antara sang profesional dan publik yang akan mendapatkan layanan profesional. Dalam profesi medis, hubungan layanan tersebut disebut hubungan dokter-pasien, dalam profesi hukum, hubungan pengacara-klien, dalam profesi rekayasa, hubungan rekayasawan-dunia industri, dalam profesi bisnis, hubungan pengusaha-konsumen. Polarisasi hubungan ini tidak menyentuh banyak hubungan sosial antara manusia yang lebih luas dari hubungan layanan profesional.

Tugas perguruan tinggi lebih luas dari pendidikan profesional. Tugas pendidikan adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa."⁹ Dalam perspektif inilah pendidikan profesi yang kerap dianut oleh banyak perguruan tinggi dewasa ini perlu membuka diri bagi etika sosial. Sang profesional tidak hanya membungkus diri pada relasi pekerjaannya. Sebaliknya, karena pekerjaannya memiliki konteks yang lebih luas, ia harus memberikan perhatian pada dimensi sosial politik. Hal ini juga berlaku dalam pendidikan etika. Aristoteles mengatakan bahwa moralitas bukanlah masalah individual melainkan

masalah sosial politik. Pertanyaan, lalu, bagaimana kita membangun etika sosial?

Asumsi-asumsi etika tidak lepas dari pemikiran Immanuel Kant tentang kehendak bebas dan rasionalitas. Kehidupan moral dijelaskan sebagai ketaatan terhadap prinsip-prinsip yang objektif, universal, dan rasional. Prinsip-prinsip tersebut mendorong kita untuk berpikir secara serius mengenai kebebasan individual, kepentingan personal, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kewajiban untuk berkata benar menjadi bagian dari moralitas ala Kant tersebut. Gagasan etika kewajiban ini dapat ditemukan dalam banyak kode etik.

Pendekatan Kant memang bermanfaat untuk membantu pengembangan penalaran moral. Namun, kelemahan dasar Kant terletak dari pendekatannya yang rasional. Moralitas tidak cukup hanya didasarkan pada pertimbangan akal, meskipun penentuan tentang yang baik dan buruk membutuhkan pertimbangan akal. Bertrand Russell sudah lama menegaskan bahwa kebaikan bukanlah sebuah konsep yang jelas dan dengan mudah ditangkap, melainkan sesuatu yang selalu ingin dicapai oleh setiap orang yang berkehendak baik. Ada dimensi 'desire' terhadap kebaikan.¹⁰ Ini berarti bahwa selain pertimbangan mengenai akal sehat, moralitas merupakan kerinduan manusia untuk menata hidupnya dengan baik.

Selain itu, Kant terjebak dalam individualisme moral.¹¹ Asumsi inilah yang membuat Hegel mengkritik teori moral Immanuel Kant. Kant, demikian Hegel, mengabaikan dimensi sosial moralitas (*Sittlichkeit*). Menurut Hegel, pemikiran dan moralitas tidak semata-mata subjektif melainkan bersifat dialektis dan

intersubjektif. Aku adalah individu yang konkret sekaligus anggota masyarakat. Legitimasi moral tidak ditentukan oleh kesadaran subjektif, melainkan dari pengakuan bersama yang teraktualisasi dalam konsep masyarakat atau negara.

Kritik Hegel ini tentu bertujuan untuk mempertegas dimensi sosial moralitas manusia. Namun demikian, dimensi individualitas moralitas tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena itu menjadi tugas kita untuk memperhatikan hubungan dialektis antara dimensi personal dan sosial tersebut. Untuk menjelaskan hubungan dialektika antara kedua dimensi ini saya kira penting kita mencermati apa yang dikemukakan oleh Will Kymlicka tentang kewarganegaraan dan otonomi personal. "Otonomi berarti hal berbeda menurut orang-orang yang berbeda."¹² Setiap orang yang otonom memiliki kemampuan untuk merefleksikan tujuan-tujuan hidupnya dan sekaligus menegaskan apakah tujuan-tujuan tersebut pantas untuk dicapai atau tidak. Otonomi dalam pengertian ini memiliki konsistensi dengan kepentingan kehidupan masyarakat yang berada di sekitarnya, meskipun ada ruang juga untuk kritik terhadap tradisi yang ia terima.

Pengertian tentang otonomi personal ini penting untuk menjelaskan gagasan kewarganegaraan. Otonomi moral merupakan syarat yang tidak dapat ditolak untuk mengerti kedudukan warga negara dewasa ini. Dalam rumusan yang amat sederhana Kymlicka menjelaskan bahwa kewarganegaraan yang otonom adalah kewarganegaraan yang bertanggung-awab. Dan kewarganegaraan yang bertanggungjawab berarti juga berani meminta pertanggungjawaban terhadap otoritas politik, jika otoritas politik

dipertanyakan. Rumusan Kymlicka ini dapat dilihat sebagai sangat formal. Namun, rumusan formal ini memiliki relevansi jika kita berbicara tentang konteks Indonesia yang terdiri dari banyak suku dan agama. Gagasan kewarganegaraan yang otonom berarti setiap kelompok etnis dan agama diperlakukan secara sama, tanpa kecurigaan dan diskriminasi – setiap kelompok dapat secara otonom menentukan identitas. Namun, kewarganegaraan juga menuntut interaksi antara kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Secara historis, batas-batas kebudayaan selalu ditandai oleh ekspresi kecurigaan terhadap kelompok yang ada di luar; setiap orang selalu kembali ke kelompoknya karena ia tidak diterima di tempat lain. Namun, gagasan kewarganegaraan yang otonom berarti batas-batas ini harus dibuka oleh dialog multikultural.

Apa yang dikemukakan oleh Kymlicka tentang dialektika antara otonomi moral dan kewarganegaraan mengandaikan kembali apa yang sudah lama dikemukakan oleh para pendukung demokrasi. Bertrand Russell menjelaskan bahwa secara etis, negara harus berbentuk demokrasi di mana warganegara yang terdidik memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mencek atau memantau pemerintah mereka. Russell melihat dalam demokrasi terdapat dua hal sekaligus: setiap individu memiliki kebebasan dan masyarakat sendiri memiliki tatanan sosial yang membuat individu dapat berkembang dan bertindak menurut hasrat dan keinginannya. Bentuk negara yang lain tidak cukup memberikan ruang bagi kebebasan individual. Sosialisme misalnya,

menurut Russell, merupakan sebuah bentuk negara yang mengabaikan kebebasan yang dimaksud.¹³

Apa yang dibicarakan di atas hanya ingin menjelaskan satu hal: moralitas bukanlah masalah individual melainkan masalah sosial. Etika sosial adalah sebuah cara kita berbicara tentang fakta moralitas kita dalam relasi sosial yang tidak dapat kita hindari itu. Dalam dimensi inilah setiap etika profesi pun tidak luput dari pemikiran tentang hubungannya dengan masyarakat. Tanggungjawab profesional tidak hanya berkaitan dengan motif individual tetapi dengan dampak yang diakibatkan oleh tindakan profesional. Dalam kapasitas sebagai profesional, setiap profesi seolah-olah harus menjawab imperatif etika Hans Jonas yang terkenal: "bertindaklah sedemikian rupa sehingga akibat-akibat tindakanmu dapat diperdamaikan dengan kelestarian kehidupan manusiawi sejati di bumi ini".¹⁴ Kelestarian kehidupan manusia sejati tidak individual, melainkan kolektif. Bahkan kehidupan yang dimaksud menyangkut juga masa depan manusia dan masa depan bumi di mana manusia hidup (lingkungan hidup).

Dalam perspektif inilah etika dapat bersifat kritis. Tugas etikawan pada intinya adalah tugas seorang pendidik politik,¹⁵ artinya mendidik anak bangsa untuk mengambil kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan bermasyarakat dan berpolitik. Dan ini berarti anak bangsa sendiri harus diberdayakan dengan gagasan demokrasi, kebebasan, dan kemanusiaan.

4. Sumbangan Etika Religius

Dalam diskusi etika, etika religius kerap kali dinilai agak sinis. Ernst Tugendhat,¹⁶ seorang Kantian sejati, mengklasifikasi etika religius sebagai etika tradisional, yang mensyaratkan iman atas wahyu, di mana tidak mungkin ada diskusi rasional apa pun. Penilaian seperti ini dapat membuat sebuah diskusi etika dengan basis agama menjadi tidak relevan. Selain itu, dewasa ini pembicaraan tentang moralitas kehilangan basis metafisika. Kecenderungan seperti ini dapat terjadi karena orde moralitas lama yang ditentukan agama tidak dapat lagi menjawab persoalan-persoalan manusia baru.

Namun penilaian yang pesimistis terhadap etika religius terlalu berlebihan. Dewasa ini ada indikasi bahwa etika religius masih dikenal dalam dunia internasional. Hans Kung¹⁷ di Jerman sedang mempromosikan etika religius untuk membangun etika global. Dengan mencoba mengangkat prinsip Aturan Emas yang didukung oleh semua agama di seluruh dunia, Kung mencoba menawarkan etika religius dalam memecahkan masalah hubungan antara manusia, hubungan antara agama, keadilan sosial dan pembangunan di negara-negara yang tertinggal.

Selain itu etika religius memiliki sumbangan yang tidak kecil dalam menjawab pertanyaan bagaimana "*to-be-able-to-be-oneself*," yang menjadi persoalan penting dari etika postmetafisika dewasa ini. Banyak filsuf eksistensial mencoba menjawab pertanyaan ini, di antaranya adalah pemikiran Soren Kierkegaard, yang sangat dekat dengan ajaran Kristen. Kierkegaard sendiri mengusulkan secara diam-diam

agar setiap individu memberikan perhatian pada Kotbah di Bukit (Matius 5-7). Ia sendiri tidak mengikuti kata-kata dalam kotbah itu. Yang menarik baginya adalah struktur kotbah tersebut mendorong orang untuk menjadi dirinya sendiri dengan melakukan refleksi diri secara etis. Menjadi diri sendiri, sebagaimana dipikirkan Kierkegaard, bukanlah hasil dari kreasi diri sendiri berdasarkan kebebasan yang ia miliki (J. P. Sartre), melainkan adalah sebuah tanggung jawab yang harus ia pikul atas dirinya, atas tatanan dunia di sekitarnya, dan atas Allah yang ia percayai. Dengan demikian menjadi diri sendiri berarti menjadi orang beriman pada Allah.¹⁸

Bagi saya pemikiran Kierkegaard tentang motif tanggung jawab tersebut dapat melengkapi gagasan formalisme moral yang dipraktekkan dewasa ini. Moralitas itu bukanlah kewajiban yang kering. Sinisme terhadap etika yang dikembangkan dewasa ini tidak terutama karena kita tidak memiliki pengetahuan tentang aturan moral, melainkan karena kita sedang mengalami apa yang disebut dengan *a corruption of the will*. Ini adalah inti dari sinisme terhadap etika dewasa ini. Moralitas bukanlah pengetahuan, sebagaimana dikatakan Sokrates. Juga, bukan kewajiban semata-mata, sebagaimana diutarakan Kant. Dan karena kita mengalami *a corruption of will*, maka kesalahan moral bukanlah sebuah *guilt*, melainkan sebuah *sin*, dosa. Dalam perspektif ini, etika religius dapat mendorong kita untuk mengerti tentang sebuah restorasi moralitas melalui pertobatan dan pengampunan sebagai jalan penyelamatan.

Dengan pandangan moral teologis inilah saya kira Kierkegaard mencoba

untuk menghubungkan moralitas sekular dengan moralitas religius. Kierkegaard rupanya bergerak jauh ke depan, *to go beyond Socrates*, dalam etikanya. Saya sendiri meragukan apakah Kierkegaard berhasil mendorong para etikawan sekuler untuk mengharapkan sebuah 'mukijzat' dari etika religius. Namun, saya kira Kierkegaard benar dalam proyeknya ketika ia menegaskan bahwa moralitas kita hanya berorientasi egosentris, yang hanya sadar tentang nasibnya sendiri untuk menjadi dirinya sendiri. Kehendak untuk menjadi diri sendiri selalu gagal jika ia tidak mengandaikan Yang Lain. Yang lain itu penting dalam pemikiran Kierkegaard. Kebebasan seorang individu pun tidak memiliki basisnya selain pada Yang Lain. Roh manusia akan mencapai kesadaran akan dirinya sendiri dengan benar hanya melalui kesadaran akan dosa: *the self exists authentically only in the presence of God*.

Etika Kierkegaard tentang menjadi diri sendiri memiliki sumbangan yang penting untuk menjawab persoalan baru berkenaan dengan perkembangan ilmu-ilmu biologi dan pengembangan bioteknologi. Kemajuan penelitian di bidang ini telah mengubah cara pandang kita tentang apa artinya menjadi diri sendiri. Jika sebelumnya kita menganggap suci terhadap kodrat organis, maka sekarang dengan kemajuan di bidang bioteknologi minat kita diarahkan pada dunia artefak dan produksinya. Penelitian atas *human genome* sudah ada di depan mata kita. Ketika itu dilaksanakan, maka batas antara 'kodrat-menentukan-siapa-diri-kita' dan "artefak-organis-yang-kita-berikan-bagi-diri-kita-sendiri" menjadi tidak jelas lagi. Lalu, apa artinya menjadi diri sendiri? Apakah seluruh implementasi

eugenetika tersebut dapat mempengaruhi kesadaran diri sebagai subjek moral yang bertanggungjawab?

Dalam kontroversi mengenai penelitian rekayasa genetika, banyak suara masih membisikkan apa yang sebenarnya ditulis Kejadian 1:27, "Maka Allah menciptakan manusia menurut GambarNya dia." Ini berarti kodrat masih dianggap suci. Dan ini masih menentukan siapa diriku sebenarnya. Proyek penelitian genetika perlu tunduk pada sebuah kebijakan yang menjamin agar setiap anak-anak masa depan juga memiliki kesadaran diri yang sama otonom dengan kita. Jika mereka hanyalah buatan reproduksi artifisial yang tidak memiliki kesadaran yang otonom, maka itu pantas dipertanyakan.

5. Kesimpulan

Pertanyaan mengenai hidup yang baik sebagai manusia merupakan pertanyaan etika yang luas dan mendalam. Luas karena ia mencakup hampir semua bidang: mulai dari kehidupan yang intim hingga kehidupan sosial dan politik. Setiap jaman akan memberikan persoalan tertentu, tetapi itu hanya sebuah mode dari sebuah orientasi umum dari apa yang kita sebut etika. Selain luas, etika memiliki fokus yang semakin mendalam, karena ia harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa artinya menjadi diri sendiri dalam lingkup pergaulan dengan banyak orang.

Tugas para etikawan sekarang menjadi berat. Yang terutama ialah pengajaran. Di sini tugasnya jelas. Di tengah fakultas-fakultas yang tidak bernuasa filsafat dan teologis, etikawan memiliki tugas berdialog dengan pada

ilmuwan. Etika profesi merupakan bidang yang cocok untuk dialog interdisipliner.

Selain itu, etikawan diminta untuk menjadi pendidik politik bagi masyarakatnya. Para peneliti Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya memiliki kesadaran ini ketika mereka merumuskan tugasnya yang khas: "Selain pengajaran filsafat dan etika, meningkatkan integrasi ilmu-ilmu filsafat dan etika ke dalam masalah-masalah sosial dan perkembangan."¹⁹ Para etikawan tentu menyadari bahwa mereka tidak bekerja untuk diri sendiri, tetapi mengarahkan diri pada kepentingan masyarakat. Ini adalah orientasi dasar dari tugas pendidikan etika. Sebagai intelektual etikawan bersentuhan dengan *ethos*, cita-cita yang umumnya bersifat transendental yang didasarkan pada *elan of humanity*. Dalam semangat etos seperti inilah ia dapat bersifat kritis terhadap sikap hipokrit yang hidup dalam masyarakat.

Inilah tugas sosial seorang etikawan terhadap masyarakat sebagaimana dicita-citakan banyak filsuf seperti Paul Ricoeur. Untuk dapat menjalankan fungsinya ini, etikawan tidak boleh terlalu statis dan dogmatis, yang hanya menyentuh prinsip-prinsip moral dasar, tetapi berusaha memasuki dunia di mana ia harus mengabdikan diri. Di sanalah ia harus dapat memberikan orientasi tentang bagaimana setiap profesi dan organisasi (politik, bisnis, agama, lingkungan hidup) harus mengembangkan diri.***

Catatan Akhir

- ¹ Karl Popper, *Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge* (London: Routledge, 1989), hal. 253 dst.
- ² Bandingkan Mikhael Dua, *Filsafat Ekonomi. Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hal. 79 dst.
- ³ Jurgen Habermas, *The Future of Human Nature* (Cambridge: Polity Press, 2003), hal. 2-3
- ⁴ Theodore Adorno, *Minima Moralia: Reflections from Damaged Life*. London: New Left Books, 1974), hal. 15
- ⁵ Timo Airaksinen, "Service and Science in Professional Life," dalam Ruth F. Chadwick (editor), *Ethics and the Professions* (Vermont, Brookfield: Ashgate Publishing Limited, 1994), hal. 1-13
- ⁶ Michael Davis, *Ethics and the University* (London: Routledge, 1999), hal. 3-22
- ⁷ K. Bertens, "Seluk Beluk Pengertian Bioetika dan Peranan PPE dalam Pengembangannya di Indonesia," *Respons* Vol. 11 no. 2, hal. 108-123
- ⁸ Charles Fledderman, *Etika Enjiniring*, sebuah terjemahan Indonesia atas teks *Engineering Ethics* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hal. 10
- ⁹ Frase ini terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- ¹⁰ Bertrand Russell, *Human Society in Ethics and Politics* (London: Routledge 1992), hal. 26-27
- ¹¹ Aleks Seran, "Hukum Reflektif Menurut Jurgen Habermas" dalam *Respons . Jurnal Etika Sosial* Vol. 11 No. 02 Desember 2006: hal. 95
- ¹² Will Kymlicka, "Education for Citizenship" dalam J. Mark Halstead (ed.), *Education in Morality* (London: Routledge 1999), hal. 79 dst.
- ¹³ Bertrand Russell, *Human Society in Ethics and Politics*, hal. 155 dst.
- ¹⁴ Hans Jonas, *Das Prinzip Verantwortung* (Frankfurt am Main: Insel Verlag 2003), hal. 15
- ¹⁵ Paul Ricoeur, *Political and Social Essays* (Athens: Ohio University Press, 1970), hal. 271 dst.
- ¹⁶ Ernst Tugendhat, *Vorlesungen uber Ethik* (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2004), hal. 65 dst.
- ¹⁷ Hans Kueng dan Dieter Senghaas, *Friedenspolitik, Ethische Grundlagen internationaler Beziehungen* (Munche: Piper Verlag, 2003), hal. 17-58
- ¹⁸ Bandingkan Jurgen Habermas, *The Future of Human Nature*, hal. 5-15
- ¹⁹ Mikhael Dua, "Laporan Kegiatan Pusat Pengembangan Etika Unika Atma Jaya tahun 2006" hal. 2

Daftar Pustaka

- Adorno, Theodor. (1974). *Minima Moralia: Reflections from Damaged Life*. London: New Left Books.
- Bertens, K. (Desember 2006). "Seluk Beluk Pengertian Bioetika dan Peranan PPE dalam Pengembangannya di Indonesia," *Respons* Vol. 11 No. 2
- Davis, Michael. (1999). *Ethics and the University*. New York: Routledge.
- Fledderman, Charles, B. (2006). *Etika Enjiniring*, sebuah terjemahan Indonesia atas teks *Engineering Ethics*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Habermas, Juergen. (2003). *The Future of Human Nature*. Cambridge: Polity Press
- Hirst, Paul H. The Demands of Moral Education: Reasons, Virtues, Practices in J. Mark Halstead and Terence H. McLaughlin (editors). (1999). *Education in Morality*. London: Routledge.
- Jonas, Hans. (2003). *Das Prinzip Verantwortung*. Frankfurt am Main: Insel Verlag
- Kymlicka, Will. Education for Citizenship in J. Mark Halstead and Terence H. McLaughlin (editors). (1999). *Education in Morality*. London: Routledge.
- Maertens, G. et. al. (1990). *Bioetika: Refleksi atas Masalah Etika Biomedis*. Jakarta: Penerbit Gramedia
- Popper, Karl. (2001). *The Logic of Scientific Discovery*. London: Routledge.
- Russell, Bertrand. (1992). *Dampak Ilmu Pengetahuan Atas Masyarakat*, sebuah terjemahan Indonesia atas *The Impact of Science on Society*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Russell, Bertrand. (1995). *Human Society in Ethics and Politics*. London: Routledge.
- Tugendhat, Ernst. (1993). *Vorlesungen ueber Ethik*. Frankfurt am Main: Insel Verlag